



KOMINFO

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2014

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jl. Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta 10110

Telp.: 021 - 345 2841; Website <http://ppid.kominfo.go.id>

E-mail : pelayanan@mail.kominfo.go.id

© 2015

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2014

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT								
PM NO.:	RINGKASAN ISI INFORMASI	UNIT/PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI
				CETAK	REKAM	ONLINE		
1	Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat <i>Troposcatter</i>	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
2	Persyaratan Teknis Kartu Cerdas Kontak (<i>Contact Smart Card</i>)	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
3	Persyaratan Teknis Sistem Peringatan Dini Bencana Alam Pada Alat Dan Perangkat Penerima Televisi Siaran Digital Berbasis <i>Standar Digital Video Broadcasting Terrestrial –Second Generation</i>	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
4	Rencana Induk (<i>Masterplan</i>) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran <i>Amplitudo Modulation (Am)</i> Pada <i>Medium Frequency (Mf)</i> Pita Frekuensi Radio 535 Khz - 1605,5 Khz	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
5	Persyaratan Teknis Perangkat <i>Integrated Receiver/Decoder</i>	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT

PM NO.:	RINGKASAN ISI INFORMASI	UNIT/PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI
				CETAK	REKAM	ONLINE		
6	Persyaratan Teknis Perangkat Router	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
7	Persyaratan Teknis Perangkat Encoder Internet Protocol Television	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
8	Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Penyadapan Yang Sah Atas Informasi Berbasis Internet Protocol Pada Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
9	Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terrestrial – Second Generation	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01



INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT

PM NO.:	RINGKASAN ISI INFORMASI	UNIT/PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/ PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI
				CETAK	REKAM	ONLINE		
10	Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler Dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
11	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda Terhadap Penyelenggara Telekomunikasi	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
12	Tata Kearsipan Dinamis Kementerian Komunikasi Dan Informatika	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
13	Kebijakan Roadmap Penerapan IPV6 Di Indonesia	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
14	Kampanye Pemilihan Umum Melalui Penggunaan Jasa Telekomunikasi	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
15	Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 11/Per/M.Kominfo/07/ 2010 Tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV)	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Jl. Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta 10110

Telp/Fax...: 021 345 2841; E-mail : pelayanan@mail.kominfo.go.id; Website : ppid.kominfo.go.id

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT

PM NO.:	RINGKASAN ISI INFORMASI	UNIT/PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/ PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI
				CETAK	REKAM	ONLINE		
16	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Tahun Anggaran 2014	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
17	Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
18	Sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
19	Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
20	Pedoman Evaluasi Program Penyediaan Akses Dan Layanan Telekomunikasi Di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT

PM NO.:	RINGKASAN ISI INFORMASI	UNIT/PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/ PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI
				CETAK	REKAM	ONLINE		
21	Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Dinas Satelit Dan Orbit Satelit	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
22	Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz Untuk Keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi Bergerak Seluler Dan Realokasi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1.9 Ghz Yang Menerapkan Personal Communication System 1900 Ke Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
23	Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
24	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler Dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01



INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT

PM NO.:	RINGKASAN ISI INFORMASI	UNIT/PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/ PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI
				CETAK	REKAM	ONLINE		
25	Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
26	Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
27	Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Sewa Saluran Siaran Pada Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
28	Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 08/Per/M.Kominfo/01/ 2009 Tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01



INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT

PM NO.:	RINGKASAN ISI INFORMASI	UNIT/PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/ PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI
				CETAK	REKAM	ONLINE		
29	Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
30	Penataan Pita Frekuensi Radio 800 Mhz Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
31	Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog Pada Pita Ultra High Frequency	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
32	Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
33	Kebijakan Pengawasan Internal Kementerian Komunikasi Dan Informatika Tahun 2014	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
34	Standar Kualitas Pelayanan Bagi Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit Dan Penyelenggara Jasa Teleponi Dasar Melalui Satelit							



INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT

PM NO.:	RINGKASAN ISI INFORMASI	UNIT/PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/ PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI
				CETAK	REKAM	ONLINE		
34	Standar Kualitas Pelayanan Bagi Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit Dan Penyelenggara Jasa Teleponi Dasar Melalui Satelit	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
35	Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
36	Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
37	Statuta Sekolah Tinggi Multi Media	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
38	Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 01/Per/M.Kominfo/ 01/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
39	Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Dan Angka Kreditnya	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT

PM NO.:	RINGKASAN ISI INFORMASI	UNIT/PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/ PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI
				CETAK	REKAM	ONLINE		
40	Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Komunikasi Dan Informatika Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01
41	Pedoman Kehadiran Pegawai Kementerian Komunikasi Dan Informatika	Biro Hukum	2014	-	√	-	Selama Berlaku	HK.02.01